

ABSTRAK

Amelia. 2024. *Efektivitas Penggunaan Dana Desa dalam Upaya Penanganan Pandemi Covid-19 2020-2022 (Studi Kasus Desa Jelapat I Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala)*, Skripsi, Program Studi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*), Fakultas Syariah. Pembimbing I Sulaiman Kurdi, S.Ag., M.Si, dan Pembimbing II Arie Sulistyoko, Sos., MH.

Kata Kunci: Efektivitas, Dana Desa, Pandemi Covid-19

Skripsi ini menyoroti penggunaan dana desa untuk penanganan dampak dari Pandemi Covid-19. Penelitian ini dilatar belakangi adanya keluhan dari sebagian warga desa yang tidak menapat bantuan dana dari pemerintah melalui dana desa. Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana Kepala Desa Jelapat I, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala mengelola dana desa dalam konteks penanganan dampak Pandemi Covid-19 selama periode 2020-2022. Selain itu, peneliti juga mencari tahu akar keluhan warga yang tidak mendapat jatah bantuan dari dana desa tersebut.

Skripsi ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Objek penelitiannya adalah pengelolaan dana desa periode 2020-2022. Peneliti melakukan wawancara dengan 10 narasumber, di antaranya, kepala desa, perangkat desa, personel keamanan, petugas kesehatan dan warga desa. Peneliti juga mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan dana desa Jelapat I. Terakhir, peneliti juga melakukan observasi lapangan selama hampir dua tahun. Semua data yang terkumpul dikelompokkan dan dipaparkan secara deskriptif dan dianalisis dengan teori efektivitas.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan dana desa Jelapat I tahun anggaran 2020-2022 adalah sangat baik. Warga desa yang menerima manfaat dari bantuan dana desa (BLT) sangat terbantu perekonomiannya yang terdampak Pandemi Covid-19. Ada pula dana desa yang dipakai untuk membeli masker yang dibagikan kepada masyarakat pada awal Pandemi ketika warga desa masih memiliki kesadaran yang rendah untuk menjaga diri mereka dari Virus Corona. Pemerintah Desa Jelapat I harus melakukan verifikasi ulang terhadap data penerima BLT sesuai kriteria yang ditentukan Pemerintah Pusat. Akibatnya terjadi pengurangan jumlah penerima BLT dari jumlah awal yang bersumber dari Pemerintah Kabupaten. Pemerintah Desa pun harus menerima protes dari warga yang tidak menerima BLT karena tidak memenuhi kriteria. Mereka rata-rata dari kalangan yang berada namun masih merasa berhak atas bantuan tersebut karena juga terdampak Pandemi Covid-19.